

BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Dalam penelitian dengan judul “Pelaksanaan *Multi-Track Diplomacy* Terhadap Australia Melalui Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA)” membahas mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagai salah satu jalur diplomasi yang digunakan oleh Bangsa Indonesia terhadap Australia. Lokasi geografis yang berdekatan antara dua kawasan telah mendorong terjalinnya berbagai kerjasama, dimana hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia secara resmi telah terjalin sejak 1950. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan kedua negara seringkali dihadapkan pada perbedaan. Dilatarbelakangi atas rasa khawatir terhadap potensi ancaman dari Bangsa Indonesia, pada tahun 1950-an pemerintah Australia secara resmi memperkenalkan Bahasa Indonesia terhadap masyarakatnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pengajaran Bahasa Indonesia. Pemerintah Australia meluncurkan berbagai kebijakan seperti penandatanganan *Cultural Agreement* pada 1968 antara Indonesia dan Australia, kebijakan *National Policy on Languages* pada 1987, kebijakan *Australian Language and Literacy Policy* pada 1991, dan pemilihan Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa prioritas dalam strategi NALSAS pada 1994 serta menjadikan Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa asing dalam program *Language Other Than English* (LOTE) pada kurikulum pendidikan. Namun, pada kenyatannya dari tahun ke tahun angka pengajaran Bahasa Indonesia dan pelajar Bahasa Indonesia di Australia menunjukkan penurunan.

Dalam konsep *multi-track diplomacy* yang digagas oleh Louise Diamond dan McDonald, edukasi menjadi bagian dari *track five* yang meliputi 3 aspek yaitu penelitian, pelatihan dan edukasi. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendidikan dalam salah satu bidang studi yaitu kebudayaan untuk melihat fenomena pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) di kawasan Australia. Sejalan dengan adanya peningkatan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional maka pemerintah Indonesia mencanangkan program Bahasa

Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) sebagai bagian dari upaya penginternasionalisasian Bahasa Indonesia. Berdasarkan data pada laman Jaga BIPA, Australia merupakan negara dengan jumlah lembaga penyelenggara BIPA terbanyak yaitu mencapai 113 lembaga dengan 7 diantaranya telah terfasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Namun, pengimplementasian program BIPA pada pelajar di kawasan Australia menunjukkan penolakan dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, Bahasa Indonesia diperkirakan telah kehilangan sekitar 10.000 pelajar setiap tahunnya sejak tahun 2005 dan 99% pelajar Australia yang mempelajari studi Bahasa Indonesia memilih tidak melanjutkan studinya tepat sebelum tahun 12. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ditemukan bahwa angka pelajar Bahasa Indonesia di kawasan Australia sangat fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2017 merupakan tahun tertinggi hingga mencapai 1580 pelajar. Namun, angka tersebut menurun drastis menjadi 184 pelajar pada tahun 2020.

Secara spesifik pada kawasan Victoria, *Department of Education and Training State of Victoria* menyatakan bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, jumlah lembaga pendidikan pada tingkatan sekolah dasar di Victoria mengalami penurunan sebesar 9%, begitu pula pada tingkatan sekolah menengah yang mengalami penurunan sebesar 3%. Selain itu, pada 2020 tercatat 19 lembaga pendidikan di Victoria membatalkan program pengajaran Bahasa Indonesia. Disisi lain, Bapak Oka Wardhana selaku perwakilan dari KJRI Melbourne menyatakan bahwa diperkirakan saat ini hanya terdapat 2 universitas di kawasan Victoria yang masih menawarkan Bahasa Indonesia sebagai salah satu program studi.

Menurunnya angka pemelajar Bahasa Indonesia di kawasan Australia diyakini disebabkan oleh berbagai hal. Pertama, masih tertanamnya stigma buruk bahwa Indonesia merupakan ‘negara yang tidak aman’ pada beberapa masyarakat di kawasan Australia. Kedua, berkembangnya bahasa asing lainnya dan anggapan bahwa Indonesia tidak akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang karena merupakan negara berkembang. Ketiga, keterbatasan dalam tenaga pengajar Bahasa Indonesia di kawasan Australia. Dengan adanya berbagai keterbatasan dan hambatan tersebut telah menyebabkan terjadinya penutupan dan pembatalan berbagai program Bahasa Indonesia di dalam berbagai tingkatan. Dalam menyikapi

tantangan dan peluang yang ada, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menggunakan berbagai pendekatan baru seperti BIPA Daring berupa bahan ajar, bahan pengayaan, bahan siaran, bahan latihan hingga bahan kebijakan yang dapat diakses melalui laman internet. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berupaya menggunakan pendekatan ekonomi berupa pelaksanaan *workshop* untuk menunjukkan potensi serta keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Melalui berbagai pendekatan baru ini diharapkan dapat meningkatkan kembali minat serta ketertarikan masyarakat Australia terhadap Bangsa Indonesia, terutama terhadap Bahasa Indonesia.

6.2. Saran

6.2.1 Saran Praktis

Hasil dari penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil mengidentifikasi signifikansi peran Bahasa Indonesia di dalam kegiatan diplomasi. Edukasi Bahasa Indonesia ini telah dilakukan secara luas termasuk di kawasan Australia. Namun, pada realitanya angka pemelajar Bahasa Indonesia di kawasan Australia terus menunjukkan penurunan. Dalam hal ini peneliti mengapresiasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KJRI dan KBRI di Australia, serta berbagai kelompok masyarakat yang terlibat dan berperan aktif dalam mendorong pengajaran Bahasa Indonesia di kawasan Australia. Adapun, peneliti menemukan beberapa hal yang dapat lebih dimaksimalkan dalam kegiatan pengajaran Bahasa Indonesia sebagai media diplomasi yaitu mengadakan pertemuan secara berkala bersama berbagai lembaga yang secara aktif terlibat dalam pengajaran Bahasa Indonesia di Australia untuk mengetahui hambatan dan peluang yang dialami pada lembaga tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti menemukan bahwa tidak seluruh lembaga pendidikan di Australia yang menawarkan program Bahasa Indonesia, tercatat oleh KJRI atau KBRI di Australia bahkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pun tidak memiliki data pasti terkait jumlah lembaga dan pelajar Bahasa Indonesia di kawasan Australia

hingga hari ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan adanya sistem pendataan dan laporan rutin setiap tahunnya yang harus diberikan oleh lembaga penyelenggara BIPA terhadap KBRI di Australia yang kemudian akan diserahkan terhadap Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara berkala telah mengirimkan tenaga pengajar ke Australia setiap tahunnya. Namun, pada faktanya masih terdapat kekurangan dalam tenaga pengajar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran berupa mengadakan diskusi dan pelatihan di Indonesia terhadap para tenaga pengajar Bahasa Indonesia yang merupakan warga Australia, sehingga para tenaga pengajar Australia memiliki pengalaman kultural secara langsung terhadap bangsa Indonesia dengan harapan ketika kembali ke negaranya dapat memberikan ilmu yang telah diperoleh menggunakan pendekatan yang sesuai dengan para pelajar di Australia. Di dalam prosesnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat melakukan pengembangan dan penyesuaian kembali materi-materi bahan ajar BIPA mengikuti kebutuhan serta pendekatan yang sesuai dengan para pelajar di Australia.

6.2.2 Saran Teoritis

Dalam proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menggunakan teori dan konsep *Multitrack Diplomacy* terutama pada jalur 5 yaitu penelitian, pelatihan dan edukasi serta *Language as Power* untuk melihat fenomena dan permasalahan yang peneliti angkat. Dalam menyusun penelitian ini peneliti mengambil sudut pandang dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang berperan secara aktif dalam pengajaran dan perluasan Bahasa Indonesia di kawasan Australia. Melalui penelitian ini peneliti memperoleh berbagai pengetahuan baru terkait program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) itu sendiri maupun pelaksanaannya di kawasan Australia. Namun, peneliti merasa penting pula untuk melihat fenomena ini melalui sudut pandang para pelajar Australia yang mempelajari Bahasa Indonesia atau pun para tenaga pengajar Bahasa Indonesia di Australia. Oleh karena

itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan perspektif baru yaitu perspektif para pelajar maupun tenaga pengajar di Australia sehingga diplomasi melalui jalur edukasi Bahasa Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih maksimal.